

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada  $7^{\circ}.33 - 8^{\circ}.12$  lintang selatan dan  $110^{\circ}.00 - 110^{\circ}.50$  bujur timur, dan memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari luas Indonesia (1860.359,67 km<sup>2</sup>) merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari :

1. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km<sup>2</sup> atau 18,40% dari luas provinsi D.I Yogyakarta.
2. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> atau 15,91% dari luas provinsi D.I Yogyakarta.
3. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> atau 46,63% dari luas provinsi D.I Yogyakarta.
4. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> atau 18,04% dari luas provinsi D.I Yogyakarta.
5. Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas provinsi D.I Yogyakarta



*Sumber : BPS DIY*

**Gambar 4.1**  
**Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan data dari Badan pertanahan Nasional, dari total luas wilayah D.I Yogyakarta yaitu 3.185,80 km<sup>2</sup> 33,05% merupakan jenis tanah lithosol, 27,09% merupakan tanah regosol, 12,38% merupakan tanah lathosol, 10,97% tanah grumosol, 10,84% merupakan jenis tanah alluvial, dan 2,48% adalah tanah jenis rensina. Sebagian dari wilayah D.I Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 – 499 meter diatas permukaan laut tercatat sebesar 65,65%. Ketinggian dibawah 100 meter diatas permukaan laut seluas 28,84%, sedangkan ketinggian 500 – 999 meter diatas permukaan laut seluas 5,04%, dan untuk ketinggian diatas 1000 meter diatas permukaan laut sebesar 0,47%.

## **2. Wilayah Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta dibatasi oleh lautan pada bagian selatan, sedangkan untuk batas wilayah bagian timur laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten, tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, dan barat laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan yang meliputi:

1. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa.
2. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa.
3. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.
4. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.
5. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

## **3. Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2035, jumlah penduduk D.I

Yogyakarta pada tahun 2016 tercatat 3.720.912 jiwa, dengan presentase perempuan 50,55% dan laki-laki 49,45%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 terhadap tahun 2010 mencapai 1,18%, angka ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya yaitu 1,13%.

Dari seluruh luas wilayah DIY yaitu 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.168 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di kota Yogyakarta dengan 12.854 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah yang hanya sekitar 1% dari luas wilayah DIY. Sedangkan untuk kabupaten gunungkidul dengan wilayah terluas sebesar 46,635 dari seluruh luas wilayah DIY memiliki kepadatan penduduk 486 jiwa per km<sup>2</sup>.

Menurut angka proyeksi penduduk 2010-2035 komposisi penduduk provinsi Daerah istimewa Yogyakarta umur 0-24 tahun sebesar 28,88%, umur 25-59 tahun sebesar 49,32%, umur 25-29 tahun tahun sebesar 8,46 persen, dan lanjut usia yaitu umur diatas 60 tahun sebesar 13,58%. Sehingga untuk angka harapan hidup penduduk DIY sebesar 74,71%.

## **B. Gambaran Umum Variabel Penelitian**

### **1. Kemiskinan**

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan

dasar dalam aspek kehidupan. Dikutip dari Sumitro Djohadikusumo (1995) ada 4 pola kemiskinan meliputi :

- a. *Persistent poverty* yaitu kemiskinan yang parah atau kronis dan bersifat turun temurun.
- b. *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c. *Seasonal poverty* yaitu kemiskinan yang terjadi tidak setiap waktu, atau hanya musiman, kemiskinan ini biasa terjadi pada petani dan nelayan.
- d. *Accidental poverty* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat tertinggi di pulau jawa, dimana pada tahun 2016 persentase penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 13,34% (BPS,2016).

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DIY**  
**tahun 2010-2016**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2010	90100	146900	148700	117000	37800
2011	92800	159400	157100	117300	37700
2012	92400	158800	156500	116800	37600
2013	86500	156600	152400	110800	35600
2014	84700	153500	148400	110400	35600
2015	88100	160200	155000	111000	36000
2016	84340	142760	139150	96630	32060

*Sumber : BPS DIY*

Tabel diatas menunjukkan tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010-2016. Terjadi fluktuasi perkembangan tingkat kemiskinan selama tujuh tahun terakhir di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana distribusi penduduk miskin pada setiap daerah menunjukkan jumlah yang tidak merata. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir rata-rata jumlah penduduk miskin terbanyak ada pada kabupaten Bantul sebesar 154.022 jiwa, kemudian disusul kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk miskin 151.035 jiwa. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan merata pada setiap daerah, kemudian jumlah penduduk miskin berkurang cukup baik sampai tahun 2014, dimana pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh atas faktor-faktor produksi asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestic atau nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam nmasing-masing daerah yang dimilikinya, oleh sebab itu angka PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah tidak sama tergantung pada potensi sumber daya alam yang tersedia dan bagaimana cara pengelolaannya.

**Tabel 4.2**  
**PDRB Kabupaten/Kota di DIY (Miliar Rupiah)**  
**Tahun 2010-2016**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2010	5033	12114	8848	21481	17202
2011	5246	12728	9248	22645	18206
2012	5475	13407	9695	23957	19189
2013	5742	14139	10177	25367	20240
2014	6004	14851	10640	26713	21308
2015	6282	15589	11152	28098	22393
2016	6581	16378	11697	29574	23538

*Sumber : BPS DIY*

Pada tabel diatas nilai PDRB setiap daerah mengalami fluktuasi dalam perkembangannya, dimana PDRB dengan angka tertinggi ada pada

kabupaten Sleman, dan terendah pada kabupaten Kulonprogo. Jika dilihat dari total PDRB D.I Yogyakarta, pada tahun 2016 yaitu sebesar 87.768 milyar naik 5,05% dibanding tahun sebelumnya yaitu 83.514 milyar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tabel 4.2 diatas seluruh daerah menunjukkan peningkatan jumlah PDRB pada setiap tahunnya.

### **3. Upah Minimum**

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri upah pokok yang didalamnya termasuk juga tunjangan tetap. Menurut UU No 13 tahun 2003, upah minimum ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 sampai dengan 1 tahun. Sasaran dari kebijakan upah minimum yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Sehingga penghasilan pekerja tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, dapat meningkatkan produktivitas pekerja, dan dapat mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien.

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan melalui proses yang panjang. Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) mulai tahun 2013 ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/kota, sedangkan untuk UMP

Daerah Istimewa Yogyakarta diambil dari UMK terendah di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung kidul.

**Tabel 4.3**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Istimewa**  
**Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2016**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2010	745694	745694	745694	745694	745694
2011	808000	808000	808000	808000	808000
2012	892660	892660	892660	892660	892660
2013	954000	993484	947114	1026181	1065247
2014	1069000	1125000	988500	1173300	1173300
2015	1138000	1163800	1108249	1200000	1305500
2016	1268870	1297700	1237700	1338000	1452400

*Sumber : BPS DIY*

Dari tabel diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota dari tahun 2010-2012 masih ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga besaran Upah Minimum Kabupaten/kota sama setiap daerahnya yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 745.694, 2011 sebesar Rp 808.000, dan 2012 sebesar Rp 892.660. kemudian dari tahun 2013 masing-masing Kabupaten/Kota memiliki UMK sendiri, dengan urutan UMK dari yang terbesar hingga terkecil yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul.

#### 4. Pendidikan

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS). Berikut adalah gambaran rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

**Tabel 4.4**  
**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk**  
**di Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2010-2016**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2010	7.85	8.34	5.59	9.79	10.88
2011	7.88	8.35	5.74	10.03	11.01
2012	7.93	8.44	6.08	10.03	11.22
2013	8.02	8.72	6.22	10.03	11.36
2014	8.20	8.74	6.45	10.28	11.39
2015	8.40	9.08	6.46	10.30	11.41
2016	8.50	9.09	6.62	10.64	11.42

*Sumber : BPS DIY*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah tertinggi selama kurun waktu 7 tahun yaitu dari tahun 2010-2016 jatuh kepada Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah sekolah

yang ada di Kota Yogyakarta, disisi lain Kota Yogyakarta juga dikenal dengan Kota Pendidikan. Sedangkan untuk angka rata-rata sekolah terendah ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul, hal ini disebabkan karena selain faktor ekonomi, juga disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana sekolah serta layanan belajar.